

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Miftahul Reza Fauziyah

rezha2710@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the influence of the presentation local financial statement and the accessibility of local financial statements to the accountability of financial management. This research is a quantitative research. The population is the Local Apparatus Working Units (SKPD) in the environment of the Municipal of Surabaya City. The sampling technique has been carried out by using purposive sampling method. The data collection techniques has been conducted in this research by using survey method. The data has been carried out by using the primary data in the form of questionnaires which have been issued to respondents. The analytical method has been run by using multiple linear regression analysis and the SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 20.0th version. The results of this research shows that the presentation of local financial statement has positive influence to the local financial management accountability and the accessibility of financial statements has positive influenceto the local financial management accountability.

Keywords: The presentation of local financial statements, the accessibility of local financial statements, the accountability of local financial management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Isu di Indonesia saat ini yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini adalah akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di

daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordriawan dan Hertianti, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tepat waktu dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya kepada publik.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah Kota Surabaya telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya tanggal 31 Desember 2015, dan

realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2015 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Surabaya menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORETIS

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina *et al.*, 2015:19). Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. (2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). (3) Tepat waktu. (4) Lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (1) Penyajian jujur. (2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). (3) Netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*) (Mardiasmo, 2002).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) (dalam Mardiasmo, 2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*).

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*).

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, serta kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar publik (badan pemeriksa, masyarakat, maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahyuni *et al.* (2014) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan penyajian laporan keuangan yang baik maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

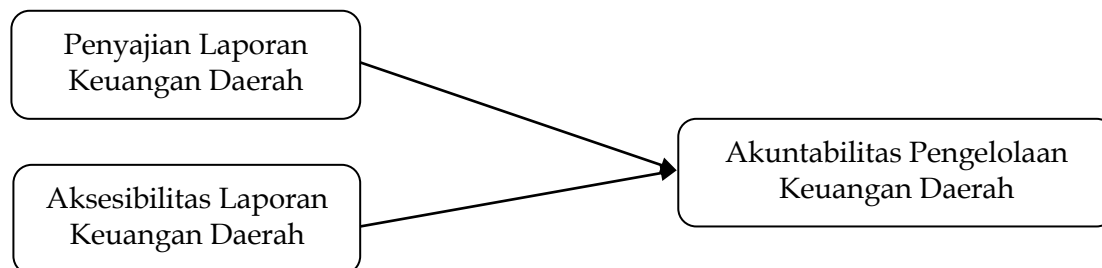
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sukhemi (2013) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan adanya kemudahan publik dalam memperoleh

informasi keuangan daerah maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan tergolong metode kausal (*causal research*). Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:13). Penelitian kausal merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang mempunyai hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2014:74). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, cara pengambilan sampel tipe ini disebut pula dengan *judgement sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2014:95). Sampel dalam penelitian ini adalah 29 SKPD Kota Surabaya. Kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah kepala Dinas/Badan/Bagian di SKPD Kota Surabaya dan bekerja di lingkungan Pemda Kota Surabaya lebih dari lima tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian adalah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran variabel menggunakan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono, 2014:132).

Definisi Operasional Variabel

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Peggy Sande tahun 2013. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah: (1) Relevan. (2) Andal. (3) Dapat dibandingkan. (4) Dapat dipahami.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan suatu daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Peggy Sande tahun 2013. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah: (1) Keterbukaan. (2) Kemudahan. (3) *Accesible*.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Peggy Sande tahun 2013. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. (2) Akuntabilitas proses. (3) Akuntabilitas program. (4) Akuntabilitas kebijakan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.0 yang bertujuan untuk menentukan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:45). Dasar analisis yang digunakan adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, jika $r_{hitung} <$

r_{tabel} , maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut ini merupakan uji validitas dengan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	PLKD1	0,733	0,2732	Valid
	PLKD2	0,764	0,2732	Valid
	PLKD3	0,761	0,2732	Valid
	PLKD4	0,597	0,2732	Valid
	PLKD5	0,591	0,2732	Valid
	PLKD6	0,504	0,2732	Valid
	PLKD7	0,712	0,2732	Valid
	PLKD8	0,743	0,2732	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	ALKD1	0,823	0,2732	Valid
	ALKD2	0,735	0,2732	Valid
	ALKD3	0,704	0,2732	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	APKD1	0,688	0,2732	Valid
	APKD2	0,565	0,2732	Valid
	APKD3	0,533	0,2732	Valid
	APKD4	0,706	0,2732	Valid
	APKD5	0,598	0,2732	Valid
	APKD6	0,624	0,2732	Valid
	APKD7	0,675	0,2732	Valid
	APKD8	0,622	0,2732	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat dari keseluruhan masing-masing item variabel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dikatakan valid, dimana r_{tabel} $N=52$ adalah 0,2732 disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2732$).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2006:41).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

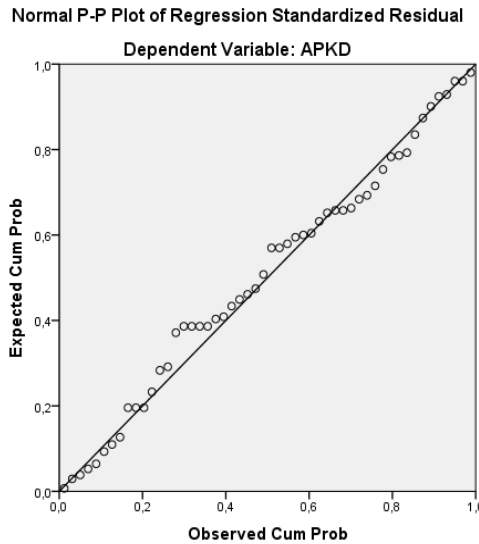
Variabel	Cronbach's alpha (α)	Koefisien alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,834	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,616	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,774	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 0,774, sedangkan penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,834 dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,616. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2
Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006:115). Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,10763497
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,053
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		,718
Asymp. Sig. (2-tailed)		,681

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,681 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

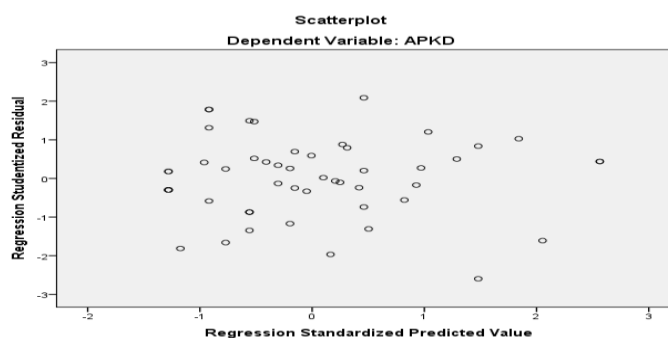
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PLKD	,967	1,034
ALKD	,967	1,034

a. Dependent Variable: APKD
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai *Tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di *studentized* (Ghozali, 2006:105). Dasar analisis: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebart di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	12,708	4,021	3,160	,003
1 PLKD	,431	,109	3,953	,000
ALKD	,611	,190	3,218	,002

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas maka prediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$APKD = 12,708 + 0,431PLKD + 0,611ALKD + \epsilon$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan diatas adalah:

1. Apabila penyajian laporan keuangan daerah semakin baik maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sebaliknya jika penyajian laporan keuangan daerah semakin buruk maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Apabila aksesibilitas laporan keuangan daerah semakin baik maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan daerah semakin buruk maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,626 ^a	,392	,367	2,150

a. Predictors: (Constant), ALKD, PLKD

b. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,392 atau 39,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 39,20% sedangkan sisanya 60,80% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Analisis regresi dengan menggunakan uji F dengan signifikansi 0,05. Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model. Hasil Uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA (Ghozali, 2011:98). Apabila nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan layak untuk digunakan pada penelitian. Sedangkan nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Berikut perhitungan yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	146,125	2	73,062	15,803	,000 ^b
Residual	226,548	49	4,623		
Total	372,673	51			

a. Dependent Variable: APKD

b. Predictors: (Constant), ALKD, PLKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan ini dapat dikatakan layak. Sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:84). Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima. Berikut ini hasil uji t menggunakan SPSS 20.0 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	12,708	4,021	3,160	,003
1 PLKD	,431	,109	3,953	,000
ALKD	,611	,190	3,218	,002

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 8 hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penyajian laporan keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 8 hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,002 yang artinya nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat disimpulkan: (1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. (3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan dalam menentukan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi dan memperbanyak sampel penelitian. (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. (3) Penelitian ini masih terbatas pada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah misalnya sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, O. S. Rambe., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Andi. Yogyakarta.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

- _____. Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Sande, P. 2013. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukhemi, S. 2013. Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika*, 10(1).
- Wahyuni, P. S., N. L. G. E. Sulindawati., dan N. T. Herawati. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 2(1).
- www.surabaya.bpk.go.id. Diakses tanggal 17 Januari 2017 (10:42).